



Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)

Mas'ut¹, Ika Puspita Dewi², Muhammad Joni Barus³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding author : masut@fe.uisu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history
 Received :
 Accepted :
 Published :

Kata Kunci:
 Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
 Penerapan sistem akuntansi keuangan;
 Kualitas laporan keuangan.

Keyword:
 Accountability of government agency performance;
 Implementation of financial accounting systems;
 Quality of financial reports.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah penerapan sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara baik secara parsial maupun secara simultan. Sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Bidang Pengelolaan Anggaran yang berjumlah 60 orang pegawai. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikolonieritas, analisis regresi linier berganda serta uji hipotesis dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, kualitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of testing whether the application of the financial accounting system and the quality of financial reports affect the accountability of government agency performance at the Regional Asset Finance Agency of North Sumatra Province both partially and simultaneously. The sample in this study were employees of the Accounting Division, Treasury and Regional Cash Division and Budget Management Division totaling 60 employees. The methods used in this research are descriptive statistical analysis, data quality test with validity and reliability test, classical assumption test with normality, heteroscedasticity and multicollinearity test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing with t test, F test and coefficient of determination. The results of the study state that the application of the financial accounting system partially has a positive and significant effect on the accountability of government agency performance, the quality of financial reports partially has a positive and significant effect on the

accountability of government agency performance, the application of the financial accounting system and the quality of financial reports simultaneously has a positive and significant effect on the accountability of government agency performance at the Regional Asset Finance Agency of North Sumatra Province.

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan penyelenggara LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang petunjuk penyusunan laporan tanggung jawab kegiatan lembaga, pelaporan kegiatan lembaga negara menjadi acuan untuk mempertimbangkan bagian dari tugas lembaga negara. keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ditentukan secara berkala dengan menggunakan alat akuntabilitas yang ditetapkan (Setyowati, 2014:3). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Negara (SAP) merupakan standar akuntansi yang harus diikuti dalam penyampaian laporan keuangan suatu instansi pemerintah. Sistem akuntansi negara harus dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan SAP. Implementasi SAP diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah melalui sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Halim, 2010:32). Penerapan pelaporan keuangan pemerintah harus membantu pengguna membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dan yang dianggarkan, mengevaluasi kondisi keuangan dan efisiensi operasi, dan membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan keuangan. dan peraturan lainnya serta membantu menilai tingkat efektifitas dan efisiensinya.

Pelaporan keuangan merupakan keterbukaan pemerintah untuk mengelola sumber daya publik (Darwanis dan Chairunnisa, 2013: 150).Kajian Ar diyana dan Binawat (2019) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan secara empiris terhadap akuntabilitas kepatuhan instansi pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumenta dkk (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja akuntabilitas lembaga negara. Selain penerapan sistem akuntansi daerah, kualitas laporan keuangan dapat berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Negara (SAP), sifat kualitatif pelaporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus dicantumkan dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat permasalahan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumut seperti keterlambatan penyampaian laporan kegiatan atau kurangnya kedisiplinan sehingga sulit untuk melaksanakan kegiatan inovasi program yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan inovatif program . akuntabilitas kinerja yang lemah. Pelaksanaan kegiatan program tidak tepat waktu atau sesuai dengan rencana yang ada. Proses pelaporan keuangan masih kurang baik. Ada ketidakcocokan dengan SAP. Pencatatan kejadian yang tidak akurat atau bahkan kejadian yang tidak tercatat. Penyajian aset tetap tidak didukung oleh daftar detail aset atau dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Cara penyajian ukuran dan nilai aktiva tetap tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Masih terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tahunan terutama mengenai pelaporan aset/barang daerah. Transparansi dan akuntabilitas SKPD secara umum masih belum memuaskan dan harus diperbaiki.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling, teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Agency theory dapat diterapkan pada berbagai organisasi, termasuk organisasi sektor publik yaitu pemerintah daerah, dan berfokus pada

masalah asimetri informasi yang terjadi antara pengurus (agent) dan publik (principals) (Mardiasmo, 2021: 199). Halim (2010: 101) menyimpulkan bahwa permasalahan pemerintah daerah merupakan bagian integral dari penelitian akuntansi sektor publik. Pengelolaan keuangan di bawah pengelolaan pemerintah daerah mutlak memikul tanggung jawab yang berkaitan dengan tugas negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanggung jawab kinerja satuan pemerintahan daerah dapat dinilai baik apabila dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini akuntabilitas dapat dicapai secara optimal dengan menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan sistem akuntansi daerah (SAKD).). dan laporan ekonomi daerah berkualitas tinggi.

Teori Stewardship

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana manajer tidak dimotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih bertujuan untuk mencapai hasil terpenting mereka untuk kepentingan organisasi, jadi teori ini memiliki landasan psikologis dan sosiologis, dirancang agar manajer adalah wali. . didorong untuk bertindak sesuai mereka. Teori ini ditujukan bagi para peneliti untuk melihat situasi di mana manajer perusahaan seperti pelayan pada dasarnya dapat dimotivasi dengan cara terbaik. Berdasarkan teori *stewardship*, prinsipal mengharapkan tanggung jawab bersama sesuai dengan kontribusi *steward*. Meskipun kontribusi direktur dan wali secara kualitatif berbeda dan tidak mudah diukur, perbandingan dan tanggung jawab bersama dapat diharapkan. Pentingnya teori kepedulian dalam penelitian ini adalah dapat menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai lembaga yang tanggap terhadap keinginan masyarakat, dapat dipercaya, dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan bertanggung jawab atas dana yang dititipkan. bahwa tujuan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *stewardship theory* adalah suatu keadaan dimana pengurus organisasi lebih mementingkan manfaat organisasi untuk mencapai keberhasilan organisasi dan kepuasan masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan kinerja menunjukkan tanggung jawab instansi pemerintah untuk mempertimbangkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang diperlukan. pemangku kepentingan. mencapai misi organisasi secara terukur melalui pencapaian tujuan/sasaran yang diidentifikasi secara periodik dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada hakekatnya merupakan alat yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi. Dalam Surat Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, LAKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi ekonomi daerah adalah sistem akuntansi yang mencakup pendaftaran, klasifikasi, interpretasi, ringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi atau peristiwa ekonomi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Lutfiyanti, 2018: 12) . Menurut Permendagr. Pasal 77 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 menyebutkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri atas pembukuan, pengikhtisaran, dan pelaporan.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah adalah entitas pelapor sebagai salah satu jenis laporan pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya keuangan yang dikelola. Laporan keuangan yang dipublikasikan disusun sesuai dengan laporan keuangan saat ini, sehingga laporan akuntansi tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas ekonomi lainnya (Lutfiyanti, 2018:17). Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan negara memenuhi

kualitas yang diinginkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Objek penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 113 pegawai. Pengambilan sampel ini dilakukan secara *non probability sampling*, yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau disebut juga penarikan sampel bertujuan (Ikhsan, 2014:115). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang terlibat dalam bidang pembuatan laporan keuangan dan laporan kinerja Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Bidang Pengelolaan Anggaran. Sampel berjumlah 60 orang pegawai.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)	Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (PP RI Nomor 29 Tahun 2014)	1. Perencanaan Stratejik 2. Perencanaan Kinerja 3. Pengukuran Kinerja 4. Pelaporan Kinerja. (Surat Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003)	Likert
2	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X ₁)	Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (Lutfiyanti, 2018:12)	1. Pencatatan, 2. Pengikhtisaran 3. Pelaporan (Lutfiyanti, 2018:13)	Likert
3	Kualitas Laporan Keuangan (X ₂)	Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. (Lutfiyanti, 2018:17)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)	Likert

Teknik analisis data terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi karakteristik responden adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Usia Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persentase
Valid	Dibawah 30 tahun	38	63.3
	30 - 39 tahun	10	16.7
	40 - 49 tahun	8	13.3
	Diatas 49 tahun	4	6.7
Total		60	100.0

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persentase
Valid	Pria	21	35.0
	Wanita	39	65.0
Total		60	100.0

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persentase
Valid	SMA	25	41.7
	Diploma	4	6.6
	Sarjana	22	36.7
	Pascasarjana	9	15.0
	Total	60	100.0

Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden Terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Jawaban	BS	B	RR	TB	STB	Total	Rata-Rata	
Bobot	5	4	3	2	1			
Y1	F	18	35	6	0	1	60	
	Skor	90	140	18	0	1	249	4.15
	%	30%	58%	10%	0%	2%	100%	
Y2	F	20	33	6	0	1	60	
	Skor	100	132	18	0	1	251	4.18
	%	33%	55%	10%	0%	2%	100%	
Y3	F	28	25	6	1	0	60	
	Skor	140	100	18	2	0	260	4.33
	%	47%	42%	10%	2%	0%	100%	
Y4	F	20	36	4	0	0	60	
	Skor	100	144	12	0	0	256	4.27
	%	33%	60%	7%	0%	0%	100%	
Y5	F	23	33	4	0	0	60	
	Skor	115	132	12	0	0	259	4.32
	%	38%	55%	7%	0%	0%	100%	
Y6	F	23	33	4	0	0	60	
	Skor	115	132	12	0	0	259	4.32
	%	38%	55%	7%	0%	0%	100%	

Jawaban		BS	B	RR	TB	STB	Total	Rata-Rata
Bobot		5	4	3	2	1		
Y7	F	21	33	5	1	0	60	4.23
	Skor	105	132	15	2	0	254	
	%	35%	55%	8%	2%	0%	100%	
Y8	F	11	40	9	0	0	60	4.03
	Skor	55	160	27	0	0	242	
	%	18%	67%	15%	0%	0%	100%	
Y9	F	23	34	3	0	0	60	4.33
	Skor	115	136	9	0	0	260	
	%	38%	57%	5%	0%	0%	100%	
Y10	F	14	39	7	0	0	60	4.12
	Skor	70	156	21	0	0	247	
	%	23%	65%	12%	0%	0%	100%	
Rata-Rata Keseluruhan								4.23

Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden Terkait Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X1)

Jawaban		BS	B	RR	TB	STB	Total	Rata-Rata
Bobot		5	4	3	2	1		
X1.1	F	21	36	3	0	0	60	4.30
	Skor	105	144	9	0	0	258	
	%	35%	60%	5%	0%	0%	100%	
X1.2	F	12	40	8	0	0	60	4.07
	Skor	60	160	24	0	0	244	
	%	20%	67%	13%	0%	0%	100%	
X1.3	F	14	40	5	0	1	60	4.10
	Skor	70	160	15	0	1	246	
	%	23%	67%	8%	0%	2%	100%	
X1.4	F	17	36	5	2	0	60	4.13
	Skor	85	144	15	4	0	248	
	%	28%	60%	8%	3%	0%	100%	
X1.5	F	17	37	6	0	0	60	4.18
	Skor	85	148	18	0	0	251	
	%	28%	62%	10%	0%	0%	100%	
X1.6	F	18	35	6	1	0	60	4.17
	Skor	90	140	18	2	0	250	
	%	30%	58%	10%	2%	0%	100%	
X1.7	F	18	36	5	1	0	60	4.18
	Skor	90	144	15	2	0	251	
	%	30%	60%	8%	2%	0%	100%	
X1.8	F	15	42	3	0	0	60	4.20
	Skor	75	168	9	0	0	252	
	%	25%	70%	5%	0%	0%	100%	
X1.9	F	21	33	5	0	1	60	4.22
	Skor	105	132	15	0	1	253	
	%	35%	55%	8%	0%	2%	100%	
X1.10	F	17	39	4	0	0	60	4.22
	Skor	85	156	12	0	0	253	
	%	28%	65%	7%	0%	0%	100%	
X1.11	F	19	36	4	1	0	60	4.22
	Skor	95	144	12	2	0	253	
	%	32%	60%	7%	2%	0%	100%	
X1.12	F	21	35	4	0	0	60	4.28
	Skor	105	140	12	0	0	257	

Jawaban Bobot	BS 5	B 4	RR 3	TB 2	STB 1	Total	Rata-Rata
%	35%	58%	7%	0%	0%	100%	
Rata-Rata Keseluruhan							4.19

Tabel 7. Distribusi Jawaban Responden Terkait Kualitas Laporan Keuangan (X2)

Jawaban Bobot	BS 5	B 4	RR 3	TB 2	STB 1	Total	Rata-Rata
X2.1	F	19	34	5	0	2	60
	Skor	95	136	15	0	2	248
	%	32%	57%	8%	0%	3%	100%
X2.2	F	19	31	7	0	3	60
	Skor	95	124	21	0	3	243
	%	32%	52%	12%	0%	5%	100%
X2.3	F	13	39	6	0	2	60
	Skor	65	156	18	0	2	241
	%	22%	65%	10%	0%	3%	100%
X2.4	F	15	35	8	0	2	60
	Skor	75	140	24	0	2	241
	%	25%	58%	13%	0%	3%	100%
X2.5	F	13	38	6	1	2	60
	Skor	65	152	18	2	2	239
	%	22%	63%	10%	2%	3%	100%
X2.6	F	11	32	9	4	4	60
	Skor	55	128	27	8	4	222
	%	18%	53%	15%	7%	7%	100%
X2.7	F	9	37	7	5	2	60
	Skor	45	148	21	10	2	226
	%	15%	62%	12%	8%	3%	100%
X2.8	F	17	36	5	0	2	60
	Skor	85	144	15	0	2	246
	%	28%	60%	8%	0%	3%	100%
X2.9	F	16	36	6	0	2	60
	Skor	80	144	18	0	2	244
	%	27%	60%	10%	0%	3%	100%
X2.10	F	17	35	5	1	2	60
	Skor	85	140	15	2	2	244
	%	28%	58%	8%	2%	3%	100%
X2.11	F	13	38	7	0	2	60
	Skor	65	152	21	0	2	240
	%	22%	63%	12%	0%	3%	100%
Rata-Rata Keseluruhan							3.99

Uji Kualitas Data

Tabel 8. Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	Pernyataan Y	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Pernyataan Y1	0,000	Valid
2	Pernyataan Y2	0,000	Valid
3	Pernyataan Y3	0,000	Valid
4	Pernyataan Y4	0,000	Valid
5	Pernyataan Y5	0,000	Valid
6	Pernyataan Y6	0,000	Valid
7	Pernyataan Y7	0,000	Valid
8	Pernyataan Y8	0,000	Valid

9	Pernyataan Y9	0,000	Valid
10	Pernyataan Y10	0,000	Valid

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan di dalam variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) memperoleh nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka masing-masing pernyataan dianggap valid sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 9. Uji Validitas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X1)

No	Pernyataan X1	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Pernyataan X1.1	0,000	Valid
2	Pernyataan X1.2	0,000	Valid
3	Pernyataan X1.3	0,000	Valid
4	Pernyataan X1.4	0,000	Valid
5	Pernyataan X1.5	0,000	Valid
6	Pernyataan X1.6	0,000	Valid
7	Pernyataan X1.7	0,000	Valid
8	Pernyataan X1.8	0,000	Valid
9	Pernyataan X1.9	0,000	Valid
10	Pernyataan X1.10	0,000	Valid
11	Pernyataan X1.11	0,000	Valid
12	Pernyataan X1.12	0,000	Valid

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan di dalam variabel penerapan sistem akuntansi keuangan (X1) memperoleh nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka masing-masing pernyataan dianggap valid sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 10. Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (X2)

No	Pernyataan X2	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Pernyataan X1.1	0,000	Valid
2	Pernyataan X1.2	0,000	Valid
3	Pernyataan X1.3	0,000	Valid
4	Pernyataan X1.4	0,000	Valid
5	Pernyataan X1.5	0,000	Valid
6	Pernyataan X1.6	0,000	Valid
7	Pernyataan X1.7	0,000	Valid
8	Pernyataan X1.8	0,000	Valid
9	Pernyataan X1.9	0,000	Valid
10	Pernyataan X1.10	0,000	Valid
11	Pernyataan X1.11	0,000	Valid

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan di dalam variabel kualitas laporan keuangan (X2) memperoleh nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka masing-masing pernyataan dianggap valid sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 11. Uji Reliabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	Pernyataan Y	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pernyataan Y1	0,907	Reliabel
2	Pernyataan Y2	0,899	Reliabel
3	Pernyataan Y3	0,894	Reliabel
4	Pernyataan Y4	0,889	Reliabel
5	Pernyataan Y5	0,888	Reliabel
6	Pernyataan Y6	0,889	Reliabel
7	Pernyataan Y7	0,890	Reliabel

8	Pernyataan Y8	0,900	Reliabel
9	Pernyataan Y9	0,887	Reliabel
10	Pernyataan Y10	0,895	Reliabel

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan di dalam variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 maka masing-masing pernyataan dianggap reliabel sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 12. Uji Reliabilitas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X1)

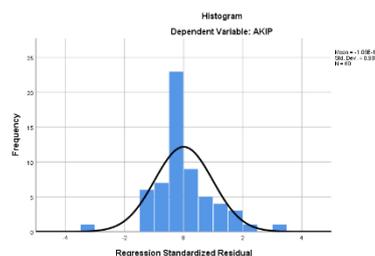
No	Pernyataan X1	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Pernyataan X1.1	0,918	Reliabel
2	Pernyataan X1.2	0,916	Reliabel
3	Pernyataan X1.3	0,928	Reliabel
4	Pernyataan X1.4	0,925	Reliabel
5	Pernyataan X1.5	0,912	Reliabel
6	Pernyataan X1.6	0,913	Reliabel
7	Pernyataan X1.7	0,917	Reliabel
8	Pernyataan X1.8	0,912	Reliabel
9	Pernyataan X1.9	0,919	Reliabel
10	Pernyataan X1.10	0,912	Reliabel
11	Pernyataan X1.11	0,912	Reliabel
12	Pernyataan X1.12	0,914	Reliabel

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan di dalam variabel penerapan sistem akuntansi keuangan (X1) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 maka masing-masing pernyataan dianggap reliabel sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 13. Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (X2)

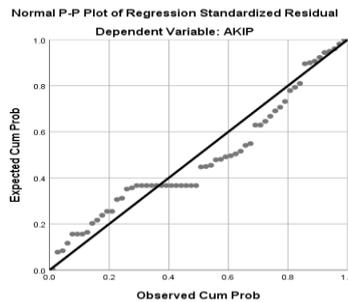
No	Pernyataan X2	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Pernyataan X1.1	0,954	Valid
2	Pernyataan X1.2	0,959	Valid
3	Pernyataan X1.3	0,953	Valid
4	Pernyataan X1.4	0,953	Valid
5	Pernyataan X1.5	0,955	Valid
6	Pernyataan X1.6	0,967	Valid
7	Pernyataan X1.7	0,962	Valid
8	Pernyataan X1.8	0,953	Valid
9	Pernyataan X1.9	0,954	Valid
10	Pernyataan X1.10	0,955	Valid
11	Pernyataan X1.11	0,953	Valid

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan di dalam variabel kualitas laporan keuangan (X2) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 maka masing-masing pernyataan dianggap reliabel sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.



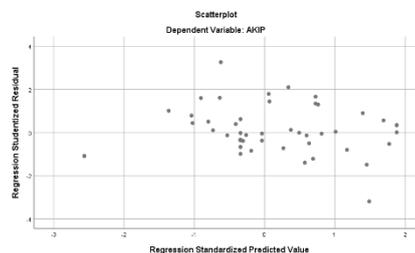
Gambar 1. Grafik Histogram

Pada grafik histogram diatas, menunjukkan distribusi data berbentuk seperti lonceng, tidak miring ke kiri ataupun ke kanan. Maka dapat dikatakan bahwa distribusi data normal.



Gambar 2. Grafik P-Plot

Pada grafik probability plot diatas, menunjukkan distribusi data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat dikatakan bahwa distribusi data normal.



Gambar 3. Grafik Scatterplot

Pada grafik scatterplot diatas, menunjukkan distribusi data menyebar tidak membentuk suatu pola tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 14. Hasil Uji Multikolonieritas

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X1)	0,818	1,223
2	Kualitas Laporan Keuangan (X2)	0,818	1,223

Hasil pengujian multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka menunjukkan bahwa model regresi data bebas dari multikolinieritas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah $Y = 9,466 + 0,542X_1 + 0,126X_2$. Dimana koefisien regresi sebesar 0,542 untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan (X1), nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan X1 sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan Y sebesar 54,2% (dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya adalah tetap). Koefisien regresi sebesar 0,126 untuk variabel kualitas laporan keuangan (X2), nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan X2 sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan Y sebesar 12,6% (dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya adalah tetap).

Tabel 15. Hasil Uji t

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	2.494	.016
	Penerapan SAK	6.648	.000
	Kualitas Lap. Keuangan	2.268	.027

Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan memiliki nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan memiliki nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,027 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Tabel 16. Uji F

	Model	F	Sig.
1	Regression	38.030	.000 ^b

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil uji F diperoleh nilai sig. Lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat dikatakan bahwa secara simultan (bersama-sama) penerapan sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Tabel 17 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 ^a	.572	.557	3.13073

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,756 atau 75,6% hal ini berarti akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dipengaruhi oleh variabel penerapan sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan sebesar 75,6% dan sisanya 24,4% dipengaruhi oleh indikator dan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penerapan sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyani dan Binawati. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1).
- Darwanis dan Chairunnisa. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 150-174.
- Halim, A. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ikhsan, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media.
- Lumenta et al. (2016). Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).
- Lutfiyanti. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Subang). Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Setyowati. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang. *Proceedings SNEB*, 5, 1–8.

JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 10 (2): 37-48; 2023

Surat Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.